



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KOTA BUKITTINGGI

TAHUN 2020



BUKITTINGGI 2019



WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 21 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan dan Pengawasan Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan melaksanakan ketentuan pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, perlu dilakukan penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bukittinggi tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 05 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2019;
10. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 03);

11. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2017 Nomor 12);
12. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 9);
13. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 97 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2017 Nomor 100);
14. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 15 tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2020 (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2019 Nomor 15).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2020

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal I

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan;

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bukittinggi
4. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
5. Pembangunan Daerah adalah upaya yang dilaksanakan oleh segenap komponen Daerah dalam rangka mencapai tujuan pembangunan yang merata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun, terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.

10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat dengan Renstra adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Kerja yang selanjutnya disingkat Renja adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
15. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat dengan RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
17. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
18. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.
19. Keluaran adalah suatu produk akhir berupa barang dan jasa dari serangkaian proses atau sumber daya pembangunan agar hasil dapat terwujud.
20. Hasil adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam suatu program.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Renja Perangkat Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2020 merupakan Dokumen Perencanaan Tahunan Perangkat Daerah yang berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021, yang mengacu kepada RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2020.

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2020 memiliki tujuan sebagai pedoman dalam penyusunan :

- a. Rancangan Kebijakan Umum APBD Perangkat Daerah Tahun 2020;
- b. Rancangan PPAS Perangkat Daerah Tahun 2020; dan
- c. Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah Tahun 2020

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 4

Renja Perangkat Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2020 memuat hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, tujuan dan sasaran perangkat daerah dan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah.

BAB IV
SISTEMATIKA RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2020
Pasal 5

- (1) Renja Perangkat Kota Bukittinggi Tahun 2019, disusun dengan sistematika sebagai berikut:
- BAB I : PENDAHULUAN
 - BAB II : HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
 - BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
 - BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
 - BAB V : PENUTUP
- (2) Renja Perangkat Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2020 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 2 Agustus 2019

WALIKOTA BUKITTINGGI,


M. RAMLAN NURMATIAS

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 2 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI


YUEN KARNOVA

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2019 NOMOR 21

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat dan rahmat-Nya, Kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi Tahun 2020 yang selanjutnya disebut Renja DPMPTSPPTK Kota Bukittinggi Tahun 2020. Renja DPMPTSPPTK Kota Bukittinggi Tahun 2020 ini memuat evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2018 dan program serta kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2020.

Kami menyadari dokumen ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya Kami mengharapkan masukan dari semua pihak yang berkepentingan baik itu berupa saran maupun kritik yang sifatnya membangun dalam rangka menuju kearah perbaikan selanjutnya.

Harapan kami Renja DPMPTSPPTK Kota Bukittinggi Tahun 2020 ini dapat menjadi acuan dalam perencanaan program dan kegiatan DPMPTSPPTK Kota Bukittinggi Tahun 2020 untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Penanaman Modal Bukittinggi. Sehingga sasaran dan tujuan DPMPTSPPTK Kota Bukittinggi dapat tercapai sesuai target yang telah ditetapkan

Bukittinggi, Agustus 2019

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KOTA BUKITTINGGI**



ISRA YONZA, SH, MH

NIP. 19710719 200212 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	Hal i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
 BAB I	
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
 BAB II	
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU	5
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	5
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	26
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	27
2.4. Review terhadap Rancangan RKPD	30
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	41
 BAB III	
TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN	44
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	44
3.2. Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan	46
3.3. Tenaga Kerja Program dan Kegiatan	46
 BAB IV	
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	50
 BAB V	
PENUTUP	56

DAFTAR TABEL

		Hal
Tabel T.C-29	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra DPMPTSPPTK s/d Tahun 2019	6
Tabel T.C-30	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi Tahun 2018	26
Tabel T.C-31	Review terhadap Rancangan RKPD Tahun 2020 DPMPTSPPTK Kota Bukittinggi	32
Tabel T.C-32	Usulan Program dan Kegiatan dari para Pemangku Kepentingan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi 2020	42
Tabel T.C-33	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021 Kota Bukittinggi	51

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Setiap perangkat daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun, yang mengimplementasikan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). Hal ini diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai implementasi pelaksanaan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Dokumen Renja Perangkat Daerah pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah.

Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sehingga penyusunan Renja PD sangat ditentukan oleh kemampuan Perangkat Daerah dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi yang selanjutnya disebut Renja DPMPTSPPTK Kota Bukittinggi Tahun 2020 berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Renja DPMPTSPPTK Kota Bukittinggi Tahun 2019 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomo 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025, (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 Nomor 08);
7. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9);

8. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2017 Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2017 Nomor 12);
10. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Renja DPMPTSPPTK Kota Bukittinggi Tahun 2020 adalah terwujudnya komitmen dan konsistensi perencanaan program serta pelaksanaan kegiatan yang dioperasionalkan secara konsekuen berdasarkan pada prioritas yang telah ditetapkan sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan daerah yang didukung sistem pengawasan dan pengendalian yang efektif.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Renja DPMPTSPPTK Kota Bukittinggi Tahun 2020 adalah untuk memberikan arah serta sebagai pedoman taktis dan strategis dalam penyelenggaraan penanaman modal, pelayanan perizinan terpadu, perindustrian dan ketenagakerjaan selama 1 (satu) tahun.

1.3.3 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja DPMPTSPPTK Kota Bukittinggi Tahun 2020 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan penyajian sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMPTSPPTK Tahun Lalu dan capaian Renstra DPMPTSPPTK
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

Berisi uraian penutup, berupa :

- a. Catatan penting mengenai pelaksanaan dan ketersediaan anggaran;
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan;
- c. Rencana tindak lanjut.

LAMPIRAN

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Berdasarkan program dan kegiatan yang ada, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi telah melaksanakan sejumlah kegiatan melalui program yang ada dengan Pagu Anggaran dan Realisasi pada tahun 2018 sebagai berikut :

- a. Pagu Tahun Anggaran 2018 termasuk Perubahan Anggaran adalah sebesar Rp. 8.985.426.547,- (delapan milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta empat ratus dua puluh enam ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah) yang terdiri dari :
 - Belanja Tidak Langsung Rp. 4.272.875.977,-
 - Belanja Langsung Rp. 4.712.550.570,-
- b. Realisasi Anggaran pada per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp. 8.160.112.826,- (delapan milyar seratus enam puluh juta seratus dua belas ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah) atau 90,81% dari pagu anggaran dengan rincian :
 - Belanja Tidak Langsung Rp.4.158.717.739,- (97,33%)
 - Belanja Langsung Rp.4.001.395.087,- (84,91%)

Sedangkan untuk Anggaran Tahun 2019 dengan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja adalah sebesar Rp. 24.749.144.562,- (Dua puluh empat milyar tujuh ratus empat puluh sembilan juta seratus empat puluh empat ribu lima ratus enam puluh dua rupiah), dimana Belanja Tidak Langsung Rp. 7.246.877.730,- (Tujuh milyar dua ratus empat puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) dan Belanja langsung sebesar Rp. 17.502.266.832,- (Tujuh belas milyar lima ratus dua juta dua ratus enam puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah).

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi Tahun 2019 (tahun berjalan) dapat dijelaskan pada Tabel T-C.29.

Tabel. T-C-29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra DPMPTSPPTK s/d Tahun 2019

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output)	Target Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target Program dan Kegiatan Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2019	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Non Urusan									
	Penunjang Urusan Pemerintahan									
	Program Pelayanan Administrasi perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,0%
	Penyediaan jasa surat menyurat.	Jumlah surat yang terkirim	72 bulan	12 bulan	175 bh, 230 bh, 4 bh, 12 bulan	175 bh, 230 bh, 4 bh, 12 bulan	100%	175 bh, 230 bh, 3 bh, 12 bulan	175 bh, 230 bh, 3 bh, 60 bulan	83%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening terbayar	72 bulan	36 rek/12 bulan	48 rek/12 bulan	48 rek/12 bulan	100%	48 rek/12 bulan	48 rek/60 bulan	83%
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan yang terpelihara	4 unit roda 4 & 7 unit roda 2	7 unit roda 4 & 14 unit roda 2	7 unit roda 4 & 14 unit roda 2	7 unit roda 4 & 14 unit roda 2	100%	8 unit roda 4 & 14 unit roda 2	7 unit roda 4 & 14 unit roda 2	83%
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jasa cleaning service dan pembelian alat kebersihan	72 bulan/ 60 unit	12 bulan/ 22 jenis	12 bulan/ 12 jenis	12 bulan/ 12 jenis	100%	12 bulan/ 25 jenis/ 2 org	60 bulan/ 59 jenis	83%
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	Pemeliharaan/peralatan/p erengkapan kantor (bulan)	72 bulan	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	1 paket	83%
	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis terbeli (jenis)	75 jenis	36 jenis	31 jenis	31 jenis	100%	31 jenis	98 jenis	131%
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah yang dijilid dan fotocopy	72 bulan	10 jenis	7 jenis, 26274 lmbr, 86 bh	7 jenis; 23917 lembar; 56 buah	100%	8 jenis, 50640 lmbr, 90 bh	7 jenis, 26274 lmbr, 86 bh	83%
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah peralatan listrik terbeli	60 jenis	11 jenis	11 jenis	11 jenis	100%	11 jenis	11 jenis	55%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output)	Target Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target Program dan Kegiatan Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2019	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah penyediaan makanan dan minuman lembur, rapat, tamu pelayanan	72 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	83%
	Rapat-rapat koordinasi, konsultasi sosialisasi dan perjalanan dinas lainnya keluar kota Bukittinggi	Pemenuhan rapat yang diikuti/dihadiri	72 bulan	90%	90%	90%	100%	90%	90%	83%
	Penyediaan jasa pegawai Non PNS	Pembayaran honor jasa non PNS dan iuran jasa BPJS	72 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	5 org/12 bulan	12 bulan	83%
	Pelaksanaan Proses Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Jumlah honorarium PPHP, PPK, PPBJ	20 paket	4 paket	4 paket	4 paket	100%	3 paket	55%	50%
	Penyediaan Petugas Pengamanan Kantor (security)	Honor security	48 bulan	-	-	-	-	-	-	-
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,0%
	Pengadaan Perlengkapan kantor	Jenis perlengkapan kantor yang diadakan	7 jenis	1 jenis	3 jenis	3 jenis	100%	-	-	-
	Pengadaan peralatan kantor	Jenis peralatan kantor yang diadakan	11 jenis	1 jenis	8 jenis	8 jenis	100%	2 jenis	6 jenis	55%
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pelaksanaan Pemeliharaan rutin gedung kantor yang dilaksanakan	72 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36 bulan	50%
	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah dokumen DED Kantor DPMPTSPPTK	1 gedung kantor	-	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 gedung	1 dokumen	25%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output)	Target Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target Program dan Kegiatan Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2019	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Pengadaan Meubelair	Jenis meubelair yang diadakan	5 item	-	-	-	-	-	-	-
	Rehab sedang/berat gedung kantor	Jumlah rehab gedung kantor (unit)	2 unit	-	1 paket	1 paket	100%	-	-	-
	Penyusunan dokumen Andalalin dan UKL UPL Pembangunan Gedung Kantor DPMPTSSPTK	Jumlah dokumen Andalalin dan UKL UPL	2 dokumen	-	2 dokumen	2 dokumen	100%	-	-	-
	Appraisal dan Penggantian Bangunan Kantor DPMPTSPPTK	Jumlah dokumen appraisal dan penggantian bangunan	1 dokumen/1 unit bangunan	-	1 dokumen/ 1 unit bangunan	1 dokumen/ 1 unit bangunan	100%	-	-	-
	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Tingkat kemampuan petugas dalam melaksanakan secara profesional pada masyarakat dan dunia usaha (%)	80%	50%	65%	65%	100%	75%	75%	94%
	Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan investasi	Jumlah petugas yang profesional di bidang penanaman modal	30 orang	6 orang	-	-	-	10 orang	12 orang	40%
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jenis dokumen capaian kinerja yang tersusun tepat waktu	18 dokumen	3 dokumen	-	-	-	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output)	Target Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target Program dan Kegiatan Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2019	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah laporan keuangan persemester yang tersusun tepat waktu	12 dokumen	2 dokumen	-	-	-	-	-	-
	Penyusunan Rencana Kerja dan Keuangan SKPD	Jumlah Rencana Kerja yang tersusun tepat waktu	42 dokumen	7 dokumen	-	-	-	-	-	-
	Urusan Wajib									
	Penanaman Modal									
	Peningkatan Pelayanan Terpadu Kepada Masyarakat	Pemenuhan pelayanan kepada masyarakat (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Dokumentasi dan Pelaporan Perizinan	Laporan Perizinan yang diterbitkan	300 laporan	50 laporan	24 laporan	24 laporan	100%	48 laporan	122 laporan	41%
	Pengelolaan Aplikasi Perizinan Online	Jumlah izin yang dikelola secara on line	86 jenis	100%	86 jenis	81 jenis	94%	81 jenis	86 jenis	100%
	Validasi dan Verifikasi Pendataan Perizinan Umum dan Teknis	Jumlah berkas perizinan yang divalidasi dan diverifikasi	12000 berkas	2000 berkas izin	-	-	-	-	-	-
	Validasi dan Verifikasi Pendataan Perizinan Sektor A dan B	Jumlah berkas perizinan yang divalidasi dan diverifikasi	12000 berkas	-	3000 berkas	3000 berkas	100%	3000 berkas	6000 berkas	50%
	Verifikasi dan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	Jumlah kasus pengaduan	210 kasus	20 kasus	60 kasus	10 kasus	16,70%	60 kasus	75 kasus	43%
	Publikasi Media Luar Ruang Pelayanan Perizinan	Jumlah tayangan informasi perizinan (media cetak; media elektronik; persentase)	80;50;90	-	85%	85%	100%	90%	85%	85%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output)	Target Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target Program dan Kegiatan Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2019	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Sosialisasi Pelayanan Perizinan	Pelaksanaan kegiatan sosialisasi perizinan (kali)	9 kali	-	1 kali	1 kali	100%	3 kali	3 kali	44%
	Penelitian dan Kajian Hukum Perizinan	Jumlah dokumen perizinan yang sesuai dengan aturan yang berlaku (dokumen)	5 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	100%	2 dokumen	3 dokumen	60%
	Pelayanan Perizinan Sektor A (Umum)	Jumlah pemeriksaan ke lapangan atas izin yang diurus masyarakat (surat tugas)	9000 izin	1500 izin	2500 izin	1221 izin	49,00%	2500 izin	4738 surat izin	58%
	Pelayanan Perizinan I Sektor B (Teknis)	Jumlah perizinan teknis yang diterbitkan (Surat Izin)	6000 surat izin	1000 izin	1200 izin	1382 izin	115,17%	1200 izin	2710 surat izin	60%
	Pelayanan Perizinan II Sektor B	Tingkat ketersediaan yang valid jumlah SK perizinan yang telah diterbitkan (%)	90%	-	85%	85%	100%	90%	85%	94%
	Tim Koordinasi Perizinan	laporan pelaksanaan koordinasi perizinan (dokumen)	6	1	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	3 laporan	50%
	Pengelolaan dan Penyajian Informasi Data	Laporan perizinan secara online (berkas)	12000	-	3000 berkas	3000 berkas	100%	1 laporan, 3000 berkas	6000 berkas	50%
	Pengawasan Tempat Usaha	Jumlah pengaduan yang diproses tertangani dengan baik (kali)	340	50 perusahaan	60 perusahaan	60 perusahaan	100%	60 perusahaan	260 perusahaan	59%
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan	Jumlah petugas FO pelayanan perizinan	4 org/48bln	-	4 org/12 bln	4 org/12 bln	100%	6 org/12 bln	4 org/36 bln	75%
	Pemeriksaan Administrasi dan Penyerahan Izin Sektor B	Tingkat pemenuhan kebutuhan perizinan administrasi dan penyerahan izin sektor B (%)	500%	-	100%	100%	100%	0	0	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output)	Target Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target Program dan Kegiatan Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2019	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Persentase Peningkatan realisasi investasi (%)	75%	25%	45%	44%	29%	65%	65%	87%
	Mengikuti Promosi Investasi Dalam dan luar Negeri	Jumlah pameran/expo yang diikuti	13 kali	2 kali	1 kali	1 kali	100%	1 kali	6 kali	46%
	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Peningkatan jumlah investor (perusahaan)	120	100	100	100	100%	110	110	92%
	Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah laporan hasil pengawasan, pembinaan, pemantauan pelaksanaan PM	6 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	3 dokumen	50%
	Peningkatan Fasilitas Terwujudnya Kerjasama Strategis antara Usaha Besar dan UKM	Jumlah pengusaha yang mengikuti sosialisasi	270 orang	50 orang	-	-	-	-	-	-
	Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah	Tingkat ketersediaan dokumen investasi	4 dokumen	1 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	50%	3 dokumen	2 dokumen	75%
	Kajian penanaman modal	Jumlah dokumen RUPM	4 dokumen	1 dokumen	-	-	-	1 dokumen	2 dokumen	50%
	Tenaga Kerja									
	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase peningkatan tenaga kerja yang memiliki keahlian (%)	65%	55%	60%	60%	100%	62%	62%	95%
	Pelatihan Kewirausahaan	Jumlah peserta kewirausahaan (orang)	96 orang	16 orang	16 orang	16 orang	100%	16 orang/9 hr	48 orang	50%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output)	Target Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target Program dan Kegiatan Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2019	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Pelayanan, Pembinaan dan Pengembangan Produktivitas Lembaga Latihan Swasta	Jumlah lembaga latihan swasta yang dibina (lembaga)	65 lembaga	-	13 lembaga, 2 lap	13 lembaga	100%	10 lembaga	26 lembaga, 2 lap	40%
	Pelatihan Menjahit	Jumlah peserta pelatihan menjahit (orang)	48 orang	-	16 orang	16 orang	100%	-	-	-
	Pelatihan Montir Elektronika	Jumlah peserta pelatihan montir elektronika (orang)	48 orang	-	16 orang	16 orang	100%	-	-	-
	Pelatihan Memasak	Jumlah peserta pelatihan memasak (orang)	48 orang	16 orang	16 orang	16 orang	100%	-	-	-
	Pelatihan Pembuatan Meubel	Jumlah peserta pelatihan pembuatan meubel (orang)	32 orang	-	-	-	-	-	-	-
	Monev Eks Siswa Pelatihan	Jumlah peserta monev eks siswa pelatihan (orang)	6 laporan	2 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	4 laporan	67%
	Pelatihan Instruktur Lembaga Latihan Swasta	Jumlah peserta pelatihan instruktur lembaga latihan swasta (orang)	39 orang	-	-	-	-	20 orang	20 orang	51%
	Pelatihan Salon	Jumlah peserta salon (orang)	32 orang	100%	16 orang	16 orang	100%	-	-	-
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelatihan Ketenagakerjaan	Jumlah sarana pelatihan yang diadakan (set)	16 set	-	-	-	-	-	-	-
	Pelatihan pembuatan bed cover	Jumlah peserta Pelatihan pembuatan bed cover	16 orang	-	-	-	-	16 orang	16 orang	100%
	Pelatihan montir sepeda motor	Jumlah peserta Pelatihan montir sepeda motor	16 orang	-	-	-	-	16 orang	16 orang	100%
	Pelatihan pembuatan dendeng singkong	Jumlah peserta Pelatihan pembuatan dendeng singkong	16 orang	-	-	-	-	16 orang	16 orang	100%
	Pelatihan modeste dasar untuk pemula	Jumlah peserta Pelatihan modeste dasar untuk pemula	16 orang	-	-	-	-	16 orang	16 orang	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output)	Target Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target Program dan Kegiatan Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2019	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Tingkat Peningkatan Penempatan Pencari Kerja (%)	23%	15%	19%	19%	100%	21%	21%	91%
	Pelayanan dan Penempatan Tenaga Kerja	Laporan informasi pasar kerja (laporan)	72 laporan	12 laporan	12 dokumen	12 dokumen	100%	12 laporan	36 laporan	50%
	Wirausaha Baru Tenaga Kerja Mandiri	Jumlah peserta WUB tenaga kerja mandiri (orang)	80 orang	-	-	-	-	-	-	-
	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Tingkat Kepatuhan Perusahaan terhadap UU Ketenagakerjaan (%)	95%	100%	70%	70%	100%	75%	75%	88%
	Penanganan kasus Perselisihan Hubungan Industrial (PHI)	Jumlah kasus PHK yang tertangani (kasus)	145 kasus	60 kasus	30 kasus	30 kasus	100,00%	30 kasus	120 kasus	83%
	Penerapan Sistem Deteksi Dini Kasus PHI di Perusahaan	Jumlah antisipasi masalah ketenagakerjaan sedini mungkin (perusahaan)	25 perusahaan	10 perusahaan	5 perusahaan	5 perusahaan	100%	10 perusahaan	25 perusahaan	100%
	Asistensi dan Pembinaan Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	PP dan PKB di perusahaan (perusahaan)	80 perusahaan	20 perusahaan	10 perusahaan	10 perusahaan	100%	10 perusahaan	40 perusahaan	50%
	Pembentukan Tim Khusus Ketenagakerjaan	Jumlah posko khusus ketenagakerjaan	4 posko	-	1 posko	1 posko	100%	1 posko	2 posko	50%
	Peningkatan kualitas SDM pegawai teknis ketenagakerjaan	Jumlah diklat teknis yang diikuti						4 kali		
	Urusan Pilihan									
	Industri									
	Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi	Meningkatnya nilai produksi IKM (%)	12%	2%	4%	4%	100%	6%	6%	60%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output)	Target Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target Program dan Kegiatan Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2019	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Pengembangan Kapasitas Pranata Pengukuran, Standarisasi, Pengujian dan Kualitas	Jumlah peserta sosialisasi/penerapan Good Manufacturing Practises (GMP) (orang)	32 orang	-	-	-	-	-	-	-
	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Jumlah IKM yang berkembang (unit usaha)	100	5%	15%	15%	100	20%	20%	67%
	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kota (RPIK) Tahun 2015-2035	Jumlah dokumen yang dihasilkan tentang kebijakan sektor industri (dokumen)	1 dokumen	-	-	-	-	2 dokumen	2 dokumen	100%
	Fasilitasi bagi industri kecil menengah terhadap pemanfaatan sumber daya produksi	Jumlah peserta pelatihan aneka sulam, membatik, tenun dan lomba produk ungu daerah serta fasilitasi dengan mitra kerja industri (orang)	150 orang	50 orang	30 orang	30 orang	100%	20 orang	110 orang	79%
	Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri	Fasilitasi mitra kerja industri (jumlah rapat kordinasi yang diikuti; jumlah peserta study pembelajaran bagi IKM kerajinan; jumlah peserta pameran)	9;9;12	-	3 Rakor	3 Rakor	100%	5 org, 20 org, 2 event	5 Rakor	42%
	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Penambahan Nilai Penjualan IKM (%)	10%	2%	4%	4%	100%	6%	6%	60%
	Perluasan penerapan standar produk industry manufaktur	Peserta sosialisasi penerapan dan konvensi GKM (IKM)	25 IKM	-	-	-	-	-	5 IKM	20%
		Peserta sosialisasi SNI terhadap produk industri (IKM)	125 IKM	-	-	-	-	-	25 IKM	20%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output)	Target Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target Program dan Kegiatan Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2019	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Pengembangan & pelayanan teknologi industri	Jumlah peserta sosialisasi dan jumlah industri makanan yang mendapat fasilitas packing (IKM)	25 IKM	25 orang	25 orang	25 IKM	100%	25 orang	25 IKM	100%
		Fasilitasi kemitraan industri (IKM)	2 IKM	-	-	-	-	5 IKM	500%	100%
		Fasilitasi label halal terhadap produk industri makanan (IKM)	20 IKM	10 IKM	10 IKM	10 IKM	100%	5 IKM	20 IKM	100%
		Fasilitasi SNI terhadap produk industri (IKM)	65 IKM	-	-	-	-	-	-	-
	Penunjang operasional pengelolaan UPTD kerajinan industri	Penunjang operasional pengelolaan UPTD kerajinan industri (%)	72 bulan	24 bulam	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	67%	50%
	Fasilitasi bagi industri kecil menengah terhadap pemanfaatan sumber daya bahan baku	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan aneka kerajinan (orang)	20 orang	-	20 orang	20 orang	100%	-	-	-
	Pelatihan rendo koto gadang	Jumlah peserta Pelatihan rendo koto gadang	20 orang	-	-	-	-	20 orang	20 orang	100%
	Perkuatan Organisasi Mitra UPTD Kerajinan Industri	Jumlah organisasi yang difasilitasi	1 organisasi	-	-	-	-	1 organisasi	1 organisasi	100%
	Program Penataan Struktur Industri	Pertumbuhan industri non formal menjadi industri formal (%)	35%	100%	14%	14%	100%	21%	21%	60%
	Kebijakan keterkaitan industri hulu-hilir	Pendataan industri kecil menengah (unit)	2200 unit	-	-	-	-	-	-	-
		Penambahan penerbitan TDI (unit)	2 unit	-	-	-	-	-	-	-
		Monev bantuan mesin peralatan (IKM)	5080 IKM	-	-	-	-	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output)	Target Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target Program dan Kegiatan Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2019	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah buku data industri (dokumen)	4 dokumen	-	4 buku	4 buku	100%	4 buku	4 buku	100%
	Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial	Peningkatan pendapatan anggota KUB (%)	10%	2%	4%	4%	100%	6%	6%	60%
	Penumbuhan sentra potensial	Jumlah IKM yang melakukan pendampingan/perkuatan KUB; IKM yang mengikuti produk unggulan daerah (IKM)	30; 8 dokumen	-	15;1	15;1	100%	5 IKM, 1 pameran, 5 hr	20 KUB	67%
	Perkuatan asosiasi makanan	Jumlah asosiasi yang dibina; jumlah pameran yang diikuti	1 asosiasi; 1 event	-	-	-	-	1 asosiasi; 1 event	1 asosiasi; 1 event	100%

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Pada umumnya penyelenggaraan pelayanan penanaman modal, perizinan, perindustrian dan tenaga kerja di Kota Bukittinggi mengalami peningkatan. Berikut indikator dan pencapaian kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel. T-C-30.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal PTSP
Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi Tahun 2019

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IK K	Target Renstra DPMPTSPPTK				Realisasi	Proyeksi		Catt.
				2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat			84	86	88	90	79.75%	88	90	
2.	Persentase peningkatan realisasi investasi			2%	5%	7%	9%	6.2%	7%	9%	
3.	Tingkat kontribusi sektor industry pengolahan pada PDRB			5.4%	5.6%	5.8%	6%	5.66%	5.8%	6%	
4.	Tingkat pengangguran terbuka			5.70%	5.50%	5%	4.93%	7.15%	6.50%	6%	

Namun peningkatan pelayanan perizinan tersebut belum diikuti oleh peningkatan kualitas pelayanan. Beberapa permasalahan yang dihadapi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi dalam peningkatan kualitas pelayanan adalah sebagai berikut :

1. Belum sempurnanya regulasi dalam hal ini aturan hukum, kebijakan daerah dan standar pelayanan di tingkat perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai tugas, fungsi dan kewenangan di bidang penanaman modal, perizinan, perindustrian dan tenaga kerja.

2. Pengembangan sistem teknologi dan informasi yang belum optimal dan belum terintegrasi dalam penerbitan izin, pengawasan, data perizinan, penerbitan kartu pencari kerja, informasi pasar kerja dan promosi produk industry.
3. Keterbatasan sarana dan prasarana dalam pemenuhan gedung kantor dan fasilitas yang representatif sesuai standar Mall Pelayanan Publik sehingga masih belum mendukung peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
4. Kompetensi Sumber Daya Aparatur yang masih belum optimal dalam mengembangkan inovasi dan kreatifitas dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal PTSP Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi.
5. Alokasi anggaran dan pedanaan yang belum proporsional dengan kebutuhan Dias dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan penanaman modal, tenaga kerja dan industry.
6. Keterbatasan tenaga fungsional industri dan fungsional ketenagakerjaan untuk memberikan pembinaan dan fasilitasi terhadap industry kecil menengah dan kelompok usaha bersama. Serta pembinaan dan fasilitasi untuk perusahaan, pencari kerja dan pekerja/buruh.
7. Masih rendahnya daya saing produk Industri Kecil Menengah untuk promosi, kemasan dan label halal sebagai pendukung kualitas produk dalam pemasarannya.
8. Masih rendahnya kesempatan kerja disebabkan tidak sesuainya kapasitas pencari kerja dan lapangan kerja yang tersedia dan tingginya jumlah pencari kerja dibandingkan dengan kesempatan kerja yang tersedia.
9. Masih belum optimalnya hubungan industrial yang baik, dilihat belum meningkatnya perusahaan yang melaksanakan Peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja Bersama dan pendukung lainnya.

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyelenggaraan serta pelayanan administrasi di bidang perizinan, penanaman modal, perindustrian dan tenaga kerja secara terpadu dengan prinsip Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, Simflikasi, Keamanan dan Kepastian.

Dalam rangka penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi sebagai perwujudan pandangan ideal dari hal - hal yang harus dicapai di masa yang akan datang, diperlukan penguasaan informasi tentang masalah - masalah penyelenggaraan pelayanan perizinan, penanaman modal, perindustrian dan tenaga kerja baik dalam lingkungan internal maupun external.

Terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, maka Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi telah melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan arah dan tujuan dari penyelenggaraan pelayanan perizinan, penanaman modal, perindustrian tenaga kerja. Hal ini dapat dilihat dari hasil yang telah dilaksanakan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan, penanaman modal, perindustrian dan tenaga kerja diantaranya :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan, penanaman modal, perindustrian dan tenaga kerja serta mempermudah dan mempercepat proses pelayanan (cepat, tepat dan transparan)
2. Pelayanan Perizinan bidang Penanaman Modal yang diberikan DPMPTSPPTK telah dilaksanakan secara On-Line tetapi tetap perlu pengembangan sehingga 81 jenis izin yang dikelola dapat dilayani secara On-Line seluruhnya
3. Perlu penyempurnaan regulasi perizinan dan penyempurnaan SOP (Standar Operasional Pelayanan) sehingga proses pengurusan isi dapat selesai tepat waktu yang akan meningkatkan indeks kepuasan masyarakat
4. Peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan ketenagakerjaan harus didukung dengan sarana prasarana yang memadai dan sesuai standarisasi yang ada, yang juga perlu didukung dengan penganggaran yang memadai
5. Kebutuhan gedung kantor DPMPTSPPTK disesuaikan dengan jumlah ASN dan sesuai standar pelayanan seharusnya dengan luas 590 m², sedangkan kondisi saat ini 210 m².
6. Kebutuhan Sumber Daya Manusia pada DPMPTSPPTK dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai analisa jabatan seharusnya berjumlah 93 orang, sedangkan kondisi saat hanya berjumlah 61 orang

7. Pembinaan dan pengembangan terhadap Industri Kecil Menengah perlu terus ditingkatkan untuk memenuhi permintaan masyarakat dalam meningkatkan IKM yang berkualitas dan berdaya saing
8. Pelaksanaan pelatihan dan pembinaan ketenagakerjaan masih sangat terbatas, baik dalam pelayanan dan penempatan tenaga kerja juga sarana dan prasarana pelatihan.

Sebagai langkah awal dalam analisis, perlu diketahui kondisi awal dan kondisi yang diharapkan oleh organisasi. Adapun kondisi awal Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja adalah sebagai berikut:

1. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi sedang dalam proses membangun dan mengembangkan konsep pelayanan dengan Mall Pelayanan Publik, tahap pembangunana 2019 dan 2020.
2. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi cenderung bersikap sebagai koordinator SKPD teknis pengelola izin, penanaman modal, perindustrian dan tenaga kerja.
3. Belum optimalnya mutu pelayanan yang meliputi pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi.
4. Sebagian besar kegiatan pelayanan yang dilaksanakan belum terstandar dan dalam pembiayaan belum mempunyai indeks biaya yang realistis.
5. Hubungan kerja/koordinasi teknis antara sesama SKPD pengelola perizinan, penanaman modal, perindustrian dan tenaga kerja belum optimal
6. Aplikasi perizinan telah dilaksanakan secara On-Line dan perlu terus dilakukan pengembangan aplikasi serta peningkatan sarana dan prasarana pendukung pelayanan perizinan dan ketenagakerjaan.

Dengan memperhatikan arah kecenderungan perkembangan organisasi dan penerapan desentralisasi dan otonomi daerah, maka situasi masa depan yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1. Menjadi fasilitator administrasi perizinan
2. Orientasi pada peningkatan kualitas pelayanan dalam semua fungsi manajemen;
3. Tertatanya aturan perizinan yang akurat;
4. Lancarnya pelaksanaan pengawasan perizinan;
5. Tersedianya dokumentasi perizinan;

6. Lancarnya pelayanan proses perizinan;
7. Mantapnya koordinasi internal antar unit kerja pada organisasi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi dengan semua OPD pengelola izin;
8. Tersedianya Sistem Aplikasi Perizinan Online meliputi semua jenis izin yang dikelola;
9. Terselenggaranya publikasi media luar ruangan yang menarik dan persuasif;
10. Terlaksananya promosi investasi dan terwujudnya kerjasama antara Usaha Besar dan UKM;
11. Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan terhadap industry kecil dan menengah;
12. Meningkatnya kualitas dan kuantitas industry kecil dan menengah;
13. Terlaksananya proses pelayanan dan penempatan tenaga kerja yang baik;
14. Meningkatnya perlindungan, penegakkan hukum ketenagakerjaan dan perluasan kesempatan kerja;
15. Meningkatnya kualitas SDM Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja dalam memberikan pelayanan.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi 2020, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kota Bukittinggi, yaitu **“Terwujudnya Bukittinggi Kota Tujuan Pariwisata, Kesehatan, Perdagangan dan Jasa Berlandaskan Nilai-nilai Agama dan Budaya”**.

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi. Adapun misi Pemerintah Kota Bukittinggi yang mendukung tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja adalah:

1. Misi 2 yaitu Meningkatkan Kinerja Pemerintahan secara Lebih Profesional, Transparan, Akuntabel dan Mempunyai Jiwa Kewirausahaan
2. Misi 4 yaitu Mengembangkan Sistem Ekonomi Perkotaan secara Lebih Berdaya Guna.

Dengan tujuan tingkat Kota yang akan dicapai:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
2. Meningkatkan pembangunan ekonomi perkotaan yang berkualitas

Adapun sasaran tingkat kota yaitu:

1. Terlaksananya reformasi birokrasi
2. Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.

Dalam dokumen Rencana Kerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi. Di samping itu dokumen rencana kerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen renja ini akan diketahui keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja. Penjabaran dari rancangan awal Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi dapat dilihat pada table T-C.31 (sebagaimana terlampir).

Tabel T-C-31
Review terhadap Rancangan RKPD Tahun 2020 DPMPTSPPTK Kota Bukittinggi

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis				
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Program Pelayanan Administrasi perkantoran	DPMP TSPP TK	Tingkat Ketersediaan Layanan Administrasi Perkantoran (%)	100%	1.035.173.797			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Materai 3000; Jumlah Materai 6000; Jumlah Buku Cek; Jasa Pengiriman Paket	175 bh; 230 bh; 4 bh; 12 bln	2.500.000			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah rRekening Telepon; Rekening Listrik; Rekening PDAM; Pembayaran Speedy	48 Rekening/ 12 Bulan	80.000.000			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional		Jumlah kendaraan terpelihara	8 unit roda 4; 14 unit roda 2	190.000.000			
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		Jasa cleaning service ; Jenis alat kebersihan dan bahan pembersih terbeli	12 bulan; 12 Jenis	84.910.000			
		Program Pelayanan Administrasi perkantoran	DPMP TSPP TK	Tingkat Ketersediaan Layanan Administrasi Perkantoran (%)	100%	919.148.335			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Materai 3000; Jumlah Materai 6000; Jumlah Buku Cek; Jasa Pengiriman Paket	175 bh; 230 bh; 4 bh; 12 bln	2.500.000			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah rRekening Telepon; Rekening Listrik; Rekening PDAM; Pembayaran Speedy	48 Rekening/ 12 Bulan	80.000.000			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional		Jumlah kendaraan terpelihara	8 unit roda 4; 14 unit roda 2	190.000.000			
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		Jasa cleaning service ; Jenis alat kebersihan dan bahan pembersih terbeli	12 bulan; 12 Jenis	84.910.000			

Rancangan Awal RKPD									Hasil Analisis								
Program/Kegiatan					Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan					Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
1					2	3	4	5	6					7	8	9	10
				Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Tersedia	1 Paket	10.000.000					Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Tersedia	1 Paket	10.000.000
				Penyediaan Alat Tulis Kantor		Jumlah Alat Tulis terbeli	46 Jenis	21.744.000					Penyediaan Alat Tulis Kantor		Jumlah Alat Tulis terbeli	46 Jenis	21.744.000
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Barang yang Dicitak; Jumlah Dokumen yang Digandakan; Jumlah Dokumen yang Dijilid	7 Jenis; 30050 Lembar; 90 Buah	35.400.000					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Barang yang Dicitak; Jumlah Dokumen yang Digandakan; Jumlah Dokumen yang Dijilid	7 Jenis; 30050 Lembar; 90 Buah	35.400.000
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jenis Peralatan Listrik yang Terbeli	11 Jenis	5.000.000					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jenis Peralatan Listrik yang Terbeli	11 Jenis	5.000.000
				Penyediaan Makanan dan Minuman		Makan dan Minum Lembur, Rapat dan Tamu Pelayanan yang Tersedia	12 bulan	20.000.000					Penyediaan Makanan dan Minuman		Makan dan Minum Lembur, Rapat dan Tamu Pelayanan yang Tersedia	12 bulan	20.000.000
				Rapat-rapat Koordinasi, konsultasi, sosialisasi dan perjalanan dinas lainnya ke luar kota Bukittinggi		Persentase Pemenuhan rapat yang diikuti/dihadiri	90%	200.000.000					Rapat-rapat Koordinasi, konsultasi, sosialisasi dan perjalanan dinas lainnya ke luar kota Bukittinggi		Persentase Pemenuhan rapat yang diikuti/dihadiri	90%	240.000.000
				Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS		Pembayaran honor jasa non PNS; iuran jasa BPJS	5 org/12 bln; 5 org/12 bln	360.619.797					Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS		Pembayaran honor jasa non PNS; iuran jasa BPJS	5 org/12 bln; 5 org/12 bln	204.594.335

Rancangan Awal RKPD									Hasil Analisis								
Program/Kegiatan					Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan					Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
1					2	3	4	5	6					7	8	9	10
				Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa		Jumlah Honorarium PPHP, PPK, PPBJ dan PPTK	5 paket	25.000.000					Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa		Jumlah Honorarium PPHP, PPK, PPBJ dan PPTK	5 paket	25.000.000
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	DPMP TSPP TK	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur (%)	100%	11.807.552.656					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	DPMP TSPP TK	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur (%)	100%	11.841.552.656
				Pengadaan meubelair		Jenis meubalair yang diadakan	11 booth	1.597.770.000					Pengadaan meubelair		Jenis peralatan kantor yang diadakan (item)	3 Jenis	1.596.770.000
				Pembangunan Kantor DPMPTSPPTK		Jumlah pembangunan gedung kantor	1 unit	10.209.782.656					Pembangunan Kantor DPMPTSPPTK (Mal Pelayanan Publik) Lanjutan		Jumlah pembangunan gedung kantor	1 unit	10.244.782.656
				Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	DPMP TSPP TK	Tingkat kemampuan petugas dalam melaksanakan secara profesional pada masyarakat dan dunia usaha (%)	65%	73.520.170					Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	DPMP TSPP TK	Tingkat kemampuan petugas dalam melaksanakan secara profesional pada masyarakat dan dunia usaha (%)	65%	96.401.530
				Peningkatan Kualitas SDM Guna Peningkatan Pelayanan DPMPTSPPTK		Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan	10 orang	73.520.170					Peningkatan Kualitas SDM Guna Peningkatan Pelayanan Investasi		Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan	10 orang	96.401.530
				Peningkatan Pelayanan Terpadu Kepada Masyarakat	DPMP TSPP TK	Peningkatan kelancaran pelayanan kepada masyarakat (%)	100%	862.215.713					Peningkatan Pelayanan Terpadu	DPMP TSPP TK	Peningkatan kelancaran pelayanan	100%	643.173.870

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis									
Program/Kegiatan					Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan					Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)		
1					2	3	4	5	6					7	8	9	10		
													Kepada Masyarakat		kepada masyarakat (%)				
					Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan		Tenaga Front Office (FO) Pelayanan Perizinan	4 Orang/12 Bulan	245.491.853					Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan		Tenaga Front Office (FO) Pelayanan Perizinan	4 Orang/12 Bulan	0	
					Pelayanan Perizinan Sektor A		Jumlah surat izin umum yang diterbitkan	2500 surat izin	84.063.530					Pelayanan Perizinan Sektor A		Jumlah surat izin umum yang diterbitkan	2500 surat izin	181.529.530	
					Verifikasi dan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat		Jumlah pengaduan yang diproses tertangani dengan baik	60 kasus	28.844.740					Verifikasi dan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat		Jumlah pengaduan yang diproses tertangani dengan baik	60 kasus	28.844.740	
					Penelitian dan Kajian Hukum Perizinan		Jumlahdokumen aturan perizinan	6 dokumen	35.089.000					Penelitian dan Kajian Hukum Perizinan		Jumlahdokumen aturan perizinan	6 dokumen	0	
					Pengelolaan Aplikasi Perizinan Online		Jenis Perizinan yang Dilayani secara On Line	81 Jenis Izin	77.233.860					Pengelolaan Aplikasi Perizinan Online		Jenis Perizinan yang Dilayani secara On Line	81 Jenis Izin	49.048.200	
					Validasi, Dokumentasi dan Pelaporan Perizinan		Jumlah Laporan Perizinan yang diterbitkan	48 laporan	25.531.000					Validasi, Dokumentasi dan Pelaporan Perizinan		Jumlah Laporan Perizinan yang diterbitkan	48 laporan	25.531.000	
					Pelayanan Perizinan Sektor B		Jumlah Perizinan Teknis yang diterbitkan	1200 surat izin	214.363.770					Pelayanan Perizinan Sektor B		Jumlah Perizinan Teknis yang diterbitkan	1200 surat izin	242.626.300	
					Publikasi Media Luar Ruang Pelayanan Perizinan		Tingkat Ketersediaan Data Informasi Perizinan yang Dikelola	90%	63.000.000					Publikasi Media Luar Ruang Pelayanan Perizinan		Tingkat Ketersediaan Data Informasi Perizinan yang Dikelola	90%	63.000.000	

Rancangan Awal RKPD									Hasil Analisis								
Program/Kegiatan					Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan					Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
1					2	3	4	5	6					7	8	9	10
				Pengelolaan dan Penyajian Informasi Data		Laporan Berkas Perizinan secara online	3000 berkas izin	77.233.860					Pengelolaan dan Penyajian Informasi Data		Laporan Berkas Perizinan secara online	3000 berkas izin	41.230.000
				Pengawasan Tempat Usaha		Jumlah Pengawasan Tempat Usaha	60 kali	11.364.100					Pengawasan Tempat Usaha		Jumlah Pengawasan Tempat Usaha	60 kali	11.364.100
				Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah	DPMP TSPP TK	Jumlah ketersediaan data dan informasi potensi dan peluang investasi (dokumen)	1 dokumen	222.194.000					Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah	DPMP TSPP TK	Jumlah ketersediaan data dan informasi potensi dan peluang investasi (dokumen)	1 dokumen	222.194.000
				Kajian penanaman modal		jumlah dokumen potensi investasi dan dokumen RUPM	1 dokumen	222.194.000					Kajian penanaman modal		jumlah dokumen potensi investasi dan dokumen RUPM	1 dokumen	222.194.000
				Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	DPMP TSPP TK	Persentase peningkatan realisasi investasi	10%	240.915.000					Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	DPMP TSPP TK	Persentase peningkatan realisasi investasi	10%	240.915.000
				Promosi dan Gelar Potensi Investasi		Jumlah calon investor yang tertarik berinvestasi	10 investor dan 1temu investasi	240.915.000					Promosi dan Gelar Potensi Investasi		Jumlah investor dan temu investasi dilaksanakan	10 investor dan 1 temu investasi	240.915.000
				Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	DPMP TSPP TK	Peningkatan Jumlah Investor	100 perusahaan	26.998.591					Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	DPMP TSPP TK	Peningkatan Jumlah Investor	100 perusahaan	32.490.000

Rancangan Awal RKPD									Hasil Analisis										
Program/Kegiatan					Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan					Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)		
1					2	3		4	5	6					7	8		9	10
				Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal		Jumlah Laporan hasil pengawasan, pembinaan, pemantauan pelaksanaan PM	120 laporan perusahaan	26.998.591					Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal		Jumlah Laporan hasil pengawasan, pembinaan, pemantauan pelaksanaan PM	12 laporan	32.490.000		
				Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	DPMP TSPP TK	Persentase peningkatan tenaga kerja yang memiliki keahlian (%)	60%	269.425.500					Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	DPMP TSPP TK	Persentase peningkatan tenaga kerja yang memiliki keahlian (%)	60%	234.548.000		
				Pelatihan Kewirausahaan		Jumlah peserta kewirausahaan (orang)	16 orang	58.200.000					Pelatihan Kewirausahaan		Jumlah peserta kewirausahaan (orang)	16 orang	58.200.000		
				Pelayanan, Pembinaan dan Pengembangan Produktivitas Lembaga Latihan Swasta		Jumlah lembaga latihan swasta yang dibina (lembaga)	10 lembaga	34.877.500					Pelayanan, Pembinaan dan Pengembangan Produktivitas Lembaga Latihan Swasta		Jumlah lembaga latihan swasta yang dibina (lembaga)	10 lembaga			
				Pelatihan modeste dasar untuk pemula		Jumlah peserta pelatihan modeste dasar untuk pemula (orang)	16 orang	78.931.000					Pelatihan modeste dasar untuk pemula		Jumlah peserta pelatihan modeste dasar untuk pemula (orang)	16 orang	78.931.000		
				Monev Eks Siswa Pelatihan		Jumlah peserta monev eks siswa pelatihan (orang)	64 orang	3.120.000					Monev Eks Siswa Pelatihan		Jumlah peserta monev eks siswa pelatihan (orang)	64 orang	3.120.000		
				Pelatihan Instruktur Lembaga Latihan Swasta		Jumlah peserta pelatihan instruktur lembaga latihan swasta (orang)	20 orang	39.836.000					Pelatihan Instruktur Lembaga Latihan Swasta		Jumlah peserta pelatihan instruktur lembaga latihan swasta (orang)	20 orang	39.836.000		

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis									
Program/Kegiatan					Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan					Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)		
1					2	3	4	5	6					7	8	9	10		
				Pelatihan tataboga		Jumlah peserta pelatihan tata boga	16 orang	54.461.000					Pelatihan tataboga		Jumlah peserta pelatihan tata boga	16 orang	54.461.000		
				Program Peningkatan Kesempatan Kerja	DPMP TSPP TK	Tingkat Peningkatan Penempatan Pencari Kerja (%)	19%	64.474.500					Program Peningkatan Kesempatan Kerja	DPMP TSPP TK	Tingkat Peningkatan Penempatan Pencari Kerja (%)	19%	64.474.500		
				Pelayanan dan Penempatan Tenaga Kerja		Laporan informasi pasar kerja (laporan)	12 dokumen	64.474.500					Pelayanan dan Penempatan Tenaga Kerja		Laporan informasi pasar kerja (laporan)	12 dokumen	64.474.500		
				Job Fair		Jumlah penempatan pencari kerja secara langsung	100 org dan 20 perusahaan	-											
				Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	DPMP TSPP TK	Tingkat Kepatuhan Perusahaan terhadap UU Ketenagakerjaan (%)	70%	47.438.450					Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	DPMP TSPP TK	Tingkat Kepatuhan Perusahaan terhadap UU Ketenagakerjaan (%)	70%	47.438.450		
				Penanganan permasalahan dan pemantauan hubungan industrial		Jumlah kasus PHI yang tertangani (kasus)	30 kasus	36.345.700					Penanganan kasus Perselisihan Hubungan Industrial (PHI)		Jumlah kasus PHI yang tertangani (kasus)	30 kasus	36.345.700		
				Asistensi dan Pembinaan Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)		Jumlah perusahaan yang dibina dalam pembentukan PP/PKB	10 perusahaan	11.092.750					Asistensi dan Pembinaan Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)		Jumlah perusahaan yang dibina dalam pembentukan PP/PKB	10 perusahaan	11.092.750		
				Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	DPMP TSPP TK	Jumlah IKM yang berkembang (unit usaha)	15	928.254.500					Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	DPMP TSPP TK	Jumlah IKM yang berkembang (unit usaha)	15	928.254.500		

Rancangan Awal RKPD									Hasil Analisis								
Program/Kegiatan					Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan					Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
1					2	3	4	5	6					7	8	9	10
				Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kota (RPIK) Bukittinggi		Jumlah dokumen RPIK (dokumen)	1 dokumen	181.965.000					Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kota (RPIK) Bukittinggi		Jumlah dokumen RPIK (dokumen)	1 dokumen	181.965.000
				Promosi Industri Kecil Menengah		Jumlah IKM yang mengikuti pameran produk unggulan	4 event	372.040.000					Promosi Industri Kecil Menengah		Jumlah IKM yang mengikuti pameran produk unggulan	4 event	372.040.000
				Pendampingan Gugus Kendali Mutu		Jumlah IKM yang mengikuti gugus kendali mutu	5 IKM	49.809.000					Pendampingan Gugus Kendali Mutu		Jumlah IKM yang mengikuti gugus kendali mutu	5 IKM	49.809.000
				Bimbingan teknis manajemen keuangan IKM		Jumlah IKM yang mengikuti Bimtek keuangan	20 orang	20.782.250					Bimbingan teknis manajemen keuangan IKM		Jumlah IKM yang mengikuti Bimtek keuangan	20 orang	20.782.250
				Pelatihan teknis Industri Kecil Menengah		Jumlah peserta pelatihan desain busana muslimah	20 orang	150.000.000					Pelatihan teknis Industri Kecil Menengah		Jumlah peserta pelatihan desain busana muslimah	20 orang	150.000.000
						Jumlah peserta pelatihan aneka cenderamata	20 orang	100.000.000							Jumlah peserta pelatihan aneka cenderamata	20 orang	100.000.000
						Jumlah peserta pelatihan merajut tingkat dasar	30 orang	53.658.250							Jumlah peserta pelatihan merajut tingkat dasar	30 orang	53.658.250
				Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	DPMP TSPP TK	Penambahan Nilai Penjualan IKM (%)	2%	482.750.000					Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	DPMP TSPP TK	Penambahan Nilai Penjualan IKM (%)	2%	483.600.000

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis				
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Pengembangan dan pelayanan teknologi industri	Jumlah sertifikasi label halal; jumlah IKM yang difasilitasi paaking	10 lembar; 10 IKM 57.750.000			Pengembangan dan pelayanan teknologi industri	Jumlah sertifikasi label halal; jumlah IKM yang difasilitasi paaking	10 lembar; 10 IKM 57.750.000
		Penunjang operasional pengelolaan UPTD kerajinan industri	Pemenuhan operasional pengelolaan UPTD Kerajinan Industri	12 bulan 175.000.000			Penunjang operasional pengelolaan UPTD kerajinan industri	Pemenuhan operasional pengelolaan UPTD Kerajinan Industri	12 bulan 175.850.000
		Perkuatan organisasi mitra industri	Organisasi mitra industri yang difasilitasi	1 organisasi dekranasda 250.000.000			Pelatihan Rendo Koto Gadang	Organisasi mitra industri yang difasilitasi	1 organisasi dekranasda 250.000.000
		TOTAL		16.060.912.877			TOTAL		15.754.190.841

2.5. PENALAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Berdasarkan hasil penelaahan usulan kegiatan masyarakat Kota Bukittinggi, Dinas Penanaman Modal PTSP Perindustrian dan Tenaga Kerja mendapatkan usulan berupa program/kegiatan yang diusulkan oleh para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi dan hasil informasi penelitian lapangan dan pengamatan.

Usulan program dan kegiatan tersebut sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DPMPTSPPTK meliputi program/kegiatan penanaman modal, perizinan, perindustrian dan tenaga kerja. Penjabaran usulan program dan kegiatan tersebut dapat dilihat pada Tabel T-C.32 berikut:

Tabel T.C-32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi Tahun 2020

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	CATATAN
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi					
1.	Promosi dan Gelar Potensi Investasi	LUAR KOTA BUKITTINGGI	Jumlah investor yang tertarik	10 investor	
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi					
1.	Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	BUKITTINGGI	Jumlah Laporan hasil pengawasan, pembinaan, pemantauan pelaksanaan PM	1 dokumen	
Program Peningkatan Pelayanan Terpadu kepada Masyarakat					
1	Pelayanan Perizinan Sektor A	DPMPTSPPTK	Jumlah surat izin umum yang diterbitkan	2500 surat izin	
2	Verifikasi dan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	DPMPTSPPTK	Jumlah pengaduan yang diproses tertangani dengan baik	60 kasus	
2	Pengelolaan Aplikasi Perizinan Online	DPMPTSPPTK	Jenis Perizinan yang Dilayani secara On Line	81 Jenis Izin	
3	Validasi, Dokumentasi dan Pelaporan Perizinan	DPMPTSPPTK	Jumlah Laporan Perizinan yang diterbitkan	48 laporan	
4	Pelayanan Perizinan Sektor B	DPMPTSPPTK	Jumlah Perizinan Teknis yang diterbitkan	1200 surat izin	
5	Publikasi Media Luar Ruang Pelayanan Perizinan	DPMPTSPPTK	Tingkat Ketersediaan Data Informasi Perizinan yang Dikelola	90%	
6	Pengelolaan dan Penyajian Informasi Data	DPMPTSPPTK	Laporan Berkas Perizinan secara online	3000 berkas izin	
7	Pengawasan Tempat Usaha	DPMPTSPPTK	Jumlah Pengawasan Tempat Usaha	60 kali	
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja					

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	CATATAN
1	Pelatihan Kewirausahaan	DPMPTSPPTK	Jumlah Peserta Pelatihan Kewirausahaan	16 orang/ 9 hari	Usulan Musrenbang Kel. Tarok Dipo Kec. Guguk Panjang
2	Pelatihan Instruktur Lembaga Latihan Swasta	DPMPTSPPTK	Jumlah Lembaga Latihan Swasta yang Dibina	10 orang	
3	Pelatihan Tata Boga	DPMPTSPPTK	Jumlah peserta pelatihan tata boga	1 Laporan	Pokir DPRD Ibnu Asis dan Kec. ABTB
4	Pelatihan Modeste Dasar untuk Pemula	DPMPTSPPTK	Jumlah peserta pelatihan modeste	20 orang	Pokir DPRD Ibnu Asis dan Kec. ABTB dan MKS
Program Pengembangan Industri Kecil Menengah					
1	Pelatihan teknis Industri kecil menengah	DPMPTSPPTK	Jumlah peserta pelatihan merajut tingkat dasar	30 orang	Usulan Kec. ABTB (pelatihan merajut benang)
2	Promosi Industri Kecil Menengah	DPMPTSPPTK	Jumlah peserta magang membuat; jumlah IKM Bimtek Achievement Motivation Training (AMT); Jumlah pameran yang diikuti	5 orang; 20 orang; 4 event/IKM	
3	Rencana Pembangunan Industri Kota (RPIK) Bukittinggi Tahun 2015-2035 (Lanjutan)	DPMPTSPPTK	Jumlah Buku RPIK Bukittinggi	1 Dokumen	
Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri					
1	Pelatihan Aneka Cenderamata	DPMPTSPPTK	Jumlah peserta pelatihan aneka cenderamata dari kain perca	20 orang	
2	Perkuatan Organisasi Mitra UPTD Kerajinan	DPMPTSPPTK	Jumlah organisasi yang difasilitasi	1 organisasi	
3	Pendampingan Gugus Kendali Mutu	DPMPTSPPTK	Jumlah peserta GKM	5 IKM	

BAB III

TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Perencanaan program dan kegiatan pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja harus merujuk pada sasaran dan kebijakan pelayanan terpadu satu pintu, tenaga kerja dan industri di tingkat nasional. DPMPTSPPTK memiliki 3 kewenangan urusan pemerintahan daerah yaitu urusan wajib non pelayanan dasar bidang penanaman modal, urusan wajib bidang tenaga kerja dan urusan pilihan bidang industri.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) bidang penanaman modal merupakan kebijakan yang diperintahkan oleh Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. PTSP di tingkat pusat dilakukan oleh lembaga yang berwenang di bidang penanaman modal yaitu Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Pemerintah mengkoordinasikan kebijakan penanaman modal baik koordinasi antar instansi pemerintah dan pemerintah daerah.

Visi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yakni Terwujudnya Indonesia sebagai Negara tujuan Investasi yang Menarik”. Agar tercapainya visi tersebut, BKPM memiliki sejumlah misi yang merupakan bentuk teknis dari visi. Misi-misi tersebut sebagai berikut:

1. Mendorong terciptanya iklim penanaman modal yang kondusif.

Misi ini mencakup penyediaan rumusan peraturan, undang-undang dan kebijakan penanaman modal.

2. Meningkatkan efektivitas promosi dan kerjasama penanaman modal.

Misi ini mencakup peningkatan minat investasi, baik dari dalam maupun luar negeri serta mendukung terciptanya kesepakatan kerjasama penanaman modal yang sesuai dengan kepentingan nasional.

3. Meningkatkan fasilitas, pelayanan dan advokasi terkait pelaksanaan penanaman modal.

Mencakup peningkatan kualitas pelayanan serta adanya pengendalian dalam pelaksanaan modal agar realisasi investasi meningkat.

4. Meningkatkan peran kelembagaan dan sistem informasi penanaman modal.

Mencakup peningkatan kualitas pelayanan perencanaan program serta mewujudkan keserasian dalam hubungan masyarakat terkait penanaman modal.

Sedangkan untuk kewenangan urusan pilihan bidang industri, mengacu pada Visi dan Misi Kementerian Perindustrian. Visi Kemenperin yaitu Indonesia menjadi Negara Industri Tangguh, yang bercirikan:

1. Struktur industri nasional yang kuat, dalam, sehat dan berkeadilan
2. Industri yang berdaya saing tinggi di tingkat global dan
3. Industri yang berbasis inovasi dan teknologi.

Untuk mewujudkan visi tersebut, pembangunan industri nasional mengembang misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan peran industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional;
2. Memperkuat dan memperdalam struktur industri nasional;
3. Meningkatkan industri yang mandiri, berdaya saing dan maju serta industri hijau;
4. Menjamin kepastian berusaha, persaingan yang sehat serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;
5. Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
6. Meningkatkan persebaran pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional dan;
7. Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

Untuk arah dan kebijakan nasional yang terkait dengan ketenagakerjaan yakni sesuai dengan kebijakan dan strategi Kementerian Ketenagakerjaan selaras dan mendukung agenda dan arah kebijakan pembangunan nasional, yang dirumuskan dengan Nawa Kerja Ketenagakerjaan, sebagai berikut:

1. Penguatan perencanaan tenaga kerja nasional
2. Percepatan peningkatan kompetensi tenaga kerja
3. Percepatan sertifikasi profesi
4. Perluasan kesempatan kerja formal
5. Penguatan wirausaha produktif
6. Penciptaan hubungan industrial yang sehat dan produktif
7. Penegakkan hukum ketenagakerjaan

8. Peningkatan perlindungan pekerja migran
9. Pelayanan ketenagakerjaan sederhana, transparan dan akuntabel.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Untuk menggambarkan hasil yang ingin dicapai dalam beberapa tahun kedepan dengan berpedoman kepada Visi dan Misi yang didasarkan pada analisis strategis lingkungan dengan konsisten kepada tugas dan fungsinya serta searah dengan perumusan sasaran, kebijakan dan program kegiatan. Dimana tujuan yang ingin dicapai Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yaitu :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan terhadap masyarakat
2. Meningkatnya nilai investasi

Sasaran merupakan gambaran hasil yang ingin dicapai suatu organisasi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Adapun Sasaran Strategis Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi sesuai dengan Tujuan di atas adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan
2. Meningkatnya peluang investasi
3. Meningkatnya kontribusi sektor industri pengolahan
4. Meningkatnya kesempatan kerja

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai upaya mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan Dinas Penanaman Modal PTSP Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi sebagai berikut :

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional;
4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
5. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
6. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
7. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
9. Penyediaan Makanan dan Minuman;
10. Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya ke Luar Kota Bukittinggi;
11. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS;
12. Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
13. Penyediaan Petugas Pengamanan Kantor (Security).
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 1. Pengadaan Peralatan Kantor;
 2. Pengadaan Perlengkapan Kantor;
 3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor;
 4. Rehab Sedang/Berat Gedung Kantor;
 5. Pembangunan Kantor DPMPTSPPTK;
 6. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional;
 7. Pengadaan Meubeler.
- 3) Peningkatan Disiplin Aparatur
 1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya.
- 4) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 1. Peningkatan Kualitas SDM guna Peningkatan Pelayanan Investasi.
- 5) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
 1. Mengikuti Promosi Investasi Dalam dan Luar Negeri.
- 6) Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
 1. Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal;
 2. Peningkatan Fasilitas Terwujudnya Kerjasama Usaha Besar dan UKM;
 3. Sosialisasi Pemahaman Pelaksanaan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) bagi Badan Usaha.

- 7) Program Peningkatan Pelayanan Terpadu Kepada Masyarakat
 1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan;
 2. Pelayanan Perizinan Sektor A;
 3. Verifikasi dan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat;
 4. Penelitian dan Kajian Hukum Perizinan;
 5. Pengelolaan Aplikasi Perizinan Online;
 6. Dokumentasi dan Pelaporan Perizinan;
 7. Validasi dan Verifikasi Pendataan Perizinan;
 8. Pemeriksaan Administrasi dan Penyerahan Izin Sektor B;
 9. Pelayanan Perizinan I Sektor B;
 10. Pelayanan Perizinan II Sektor B;
 11. Tim Koordinasi Perizinan;
 12. Publikasi Media Luar Ruang Pelayanan Perizinan;
 13. Pengelolaan dan Penyajian Informasi Data;
 14. Pengawasan Tempat Usaha;
 15. Pengadaan Perangkat Komputer Perizinan;
 16. Pendataan Tiang Kerangka Baliho.
- 8) Program Penyiapan Potensi Sumberdaya Sarana dan Prasarana Daerah
 1. Lanjutan Penyusunan Kajian Sumber Daya Potensi;
- 9) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
 1. Fasilitasi bagi industri kecil menengah terhadap pemanfaatan sumber daya produksi;
 2. Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan kluster industri;
 3. Rencana Pengembangan Industri Kota Tahun 2015-2035.
 4. Pelatihan Rendo Koto Gadang;
- 10) Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
 1. Perluasan Penerapan Standar Produk Industri Manufaktur;
 2. Penunjang Operasional Pengelolaan UPTD Kerajinan Industri;
 3. Fasilitasi Kegiatan Dekranasda.
- 11) Program Pengembangan Sentra-Sentra Potensial
 1. Penumbuhan sentra potensial;
 2. Perkuatan Asosiasi Makanan.

12) Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi

1. Pengembangan Kapasitas Pengukuran Standarisasi Pengujian dan Kualitas.

13) Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan.

1. Peningkatan Kualitas SDM Pegawai Teknis Ketenagakerjaan;
2. Penanganan Kasus PHI;
3. Penerapan Sistem Deteksi Dini Kasus PHI;
4. Asistensi dan Pembinaan Penyusunan PP dan PKB;
5. Pembentukan Tim Khusus Ketenagakerjaan.

14) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja.

1. Pelatihan Kewirausahaan;
2. Pelayanan, Pembinaan, dan Pengembangan Produktivitas Lembaga Latihan Swasta;
3. Pelatihan Montir Sepeda Motor;
4. Pelatihan Service Handphone;
5. Pelatihan Pembuatan Bed Cover;
6. Pelatihan Instruktur Lembaga Latihan Swasta;
7. Pelatihan Kerajinan Bambu.
8. Monev Eks. Siswa Pelatihan.

15) Program Peningkatan Kesempatan Kerja.

1. Pelayanan dan Penempatan Tenaga Kerja;
2. Job Fair.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020, rencana program dan kegiatan DPMPTSPPTK telah disusun berdasarkan pada hasil evaluasi capaian Renja Tahun 2018 dan Perkiraan Capaian target Renja Tahun 2019. Evaluasi ini dilakukan terhadap realisasi pencapaian target kegiatan, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi menunjukkan perlu dilakukan perubahan dan inovasi terhadap program dan kegiatan.

Rencana program dan kegiatan pada Renja 2020 yang disertai dengan pagu indikatif, tolok ukur kinerja yang dirinci menurut urusan pemerintah daerah yang menjadi kewenangan Dinas Penanaman Modal, PTSP, Perindustrian dan Tenaga Kerja. Rencana kerja berupa rincian program, kegiatan dan pendanaan Dinas Penanaman Modal, PTSP, Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2020 diuraikan pada Tabel T-C.33 sebagai berikut:

Tabel T.C-33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja
Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021 Kota Bukittinggi

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (N)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 (N+1)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Non Urusan								
	Penunjang Urusan Pemerintahan								
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Ketersediaan Layanan Administrasi Perkantoran		100%	919,148,335			100%	937,981,302
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai 3000; Jumlah Materai 6000; Jumlah Buku Cek; Jasa Pengiriman Paket	DPMPTSPPTK	175 bh; 230 bh; 4 bh; 12 bln	2,500,000	DAU		175 bh; 230 bh; 4 bh; 12 bln	3,000,000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Telepon; Rekening Listrik; Rekening PDAM; Pembayaran Speedy	DPMPTSPPTK	48 Rekening/ 12 Bulan	80,000,000	DAU		48 Rekening/ 12 Bulan	81,600,000
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan terpelihara	DPMPTSPPTK	8 unit roda 4; 14 unit roda 2	190,000,000	DAU		7 unit roda 4; 14 unit roda 2	193,800,000
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jasa cleaning service ; Jenis alat kebersihan dan bahan pembersih terbeli	DPMPTSPPTK	12 bulan; 12 Jenis	84,910,000	DAU		12 bulan; 12 Jenis	86,608,200
5	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Tersedia	DPMPTSPPTK	1 Paket	10,000,000	DAU		1 Paket	10,200,000
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis terbeli	DPMPTSPPTK	37 jenis	21,744,000	DAU		40 Jenis	22,178,880
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang yang Dicitak; Jumlah Dokumen yang Digandakan; Jumlah Dokumen yang Dijilid	DPMPTSPPTK	8 Jenis; 50640 Lembar; 90 dokumen	35,400,000	DAU		7 Jenis; 30028 Lembar; 86 Buah	36,108,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (N)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 (N+1)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Peralatan Listrik yang Terbeli	DPMPTSPPTK	11 jenis	5,000,000	DAU		11 Jenis	5,100,000
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makan dan Minum Lembur, Rapat dan Tamu Pelayanan yang Tersedia	DPMPTSPPTK	720 kotak dan 516 bungkus	20,000,000	DAU		12 bulan	20,400,000
10	Rapat-rapat Koordinasi, konsultasi, sosialisasi dan perjalanan dinas lainnya ke luar kota Bukittinggi	Persentase Pemenuhan rapat yang diikuti/dihadiri	DPMPTSPPTK	90%	240,000,000	DAU		90%	244,800,000
11	Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	Pembayaran honor jasa non PNS; iuran jasa BPJS	DPMPTSPPTK	5 org/12 bln; 5 org/12 bln	204,594,335	DAU		5 org/12 bln; 5 org/12 bln	208,686,222
12	Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Honorarium PPHP, PPK, PPBJ dan PTK	DPMPTSPPTK	4 jenis	25,000,000	DAU		4 paket	25,500,000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan sarana dan prasarana aparatur		100%	11,841,552,656			100%	3,000,000,000
1	Pengadaan meubelair	Jenis meubelair (meja kerja, kursi kerja, lemari, kursi dan meja tunggu, rak pajangan, meja tamu dll)	DPMPTSPPTK	11 booth dan 9 ruangan	700,000,000	DAU		3 jenis	2,500,000,000
2	Pengadaan peralatan kantor	Jenis peralatan kantor yang diadakan	DPMPTSPPTK	24 jenis	896,770,000	DAU		12 jenis	500,000,000
3	Pembangunan Kantor DPMPTSPPTK (Mall Pelayanan Publik) lanjutan	Jumlah pembangunan gedung kantor	DPMPTSPPTK	1 unit	10,244,782,656	DAU			
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat Kelengkapan sarana dan prasarana aparatur		100%	58,400,000			100%	59,568,000
1	Peningkatan Kualitas SDM Guna Peningkatan Pelayanan DPMPTSPPTK	Jumlah ASN yang mengikuti pelatihanpeningkatan kapasitas SDM	Luar Kota Bukittinggi	10 orang	58,400,000	DAU		12 bulan	59,568,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (N)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 (N+1)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai (%)		100%	46,150,000			100%	47,073,000
1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta kelengkapannya yang tersedia	Kota Bukittinggi	71 stel	46,150,000	DAU		12 bulan	47,073,000
	Urusan Wajib								
	Penanaman Modal								
	Program Peningkatan Pelayanan Terpadu kepada Masyarakat	Peningkatan Kelancaran Pelayanan Kepada Masyarakat (%)		100%	643,724,800			100%	656,599,296
1	Pelayanan Perizinan Sektor A	Jumlah surat izin umum yang diterbitkan; jumlah tenaga FO dan BO Perizinan Sektor A	Kota Bukittinggi	2500 surat izin; 2 orang; 1 orang	181,529,530	DAU		150 surat tugas	185,160,121
2	Pelayanan Perizinan Sektor B	Jumlah Perizinan Teknis yang diterbitkan; jumlah tenaga FO dan BO Perizinan sektor B	Kota Bukittinggi	1200 surat izin; 2 orang; 1 orang	208,935,800	DAU		1200 surat izin	213,114,516
3	Verifikasi dan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	Jumlah pengaduan yang diproses tertangani dengan baik	Kota Bukittinggi	60 kasus	28,444,740	DAU		60 kasus	29,013,635
4	Pengelolaan Aplikasi Perizinan Online	Jenis Perizinan yang Dilayani secara On Line; jml. Aplikasi perizinan yang dikelola	Kota Bukittinggi	85 jenis izin	105,548,200	DAU		86 Jenis Izin	107,659,164
5	Validasi, Dokumentasi dan Pelaporan Perizinan	Jumlah berkas perizinan yang divalidasi dan diferifikasi	Kota Bukittinggi	3000 berkas	22,031,000	DAU		3000 berkas	22,471,620
6	Publikasi Media Luar Ruang Pelayanan Perizinan	Jenis publikasi yang dicetak; jml. Tayang informasi perizinan	Kota Bukittinggi	3 jenis; 4kali/hari/4bln	66,481,430	DAU		85%	67,811,059

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (N)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 (N+1)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7	Pengelolaan dan Penyajian Informasi Data	Laporan Berkas Perizinan secara online; aplikasi data perizinan	Kota Bukittinggi	3000 berkas izin; 1 aplikasi	20,890,000	DAU		3000 berkas izin; 1 aplikasi	21,307,800
8	Pengawasaan Tempat Usaha	Jumlah Pengawasan Tempat Usaha	Kota Bukittinggi	30 tempat	9,864,100	DAU		30 tempat	10,061,382
	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Persentase peningkatan realisasi investasi		55%	146,067,000			65%	148,988,340
1	Promosi dan Gelar Potensi Investasi	Jumlah calon investor yang tertarik berinvestasi	Luar Kota Bukittinggi	10 investor dan 1 temu investasi	146,067,000	DAU		10 investor dan 1 temu investasi	148,988,340
	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Peningkatan Jumlah Investor		110 perusahaan	32,490,000			115 perusahaan	33,139,800
1	Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Laporan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan PM	Kota Bukittinggi	1 dokumen	32,490,000	DAU		1 dokumen	33,139,800
	Program Penyiapan Potensi Sumberdaya Sarana dan Prasarana Daerah	Jumlah dokumen kebijakan penanamna modal		3 dokumen	174,194,000			4 dokumen	177,677,880
1	Kajian Penanaman Modal	Jml Kebijakan investasi; Jml. Buku profil investasi	Kota Bukittinggi	2 dokumen	174,194,000	DAU		1 dokumen	177,677,880
	Tenaga Kerja								
	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase peningkatan tenaga kerja yang memiliki keahlian		62%	137,637,100			64%	140,389,842
1	Pelatihan Kewirausahaan	Jumlah Peserta Pelatihan Kiwirausahaan	Kota Bukittinggi	16 orang/ 9 hari	58,200,000	DAU		16 orang/ 9 hari	59,364,000
2	Pelatihan Tata Boga	Jumlah peserta pelatihan tata boga	Kota Bukittinggi	16 orang	53,481,100	DAU		16 orang	54,550,722
3	Pelatihan Instruktur lembaga latihan Swasta	Jumlah instruktur lembaga latihan swasta yang dilatih	Kota Bukittinggi	20 orang	22,836,000	DAU		30 orang	23,292,720

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (N)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 (N+1)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	Monev Eks.siswa Pelatihan	Jumlah eks siswa pelatihan yang bekerja	Kota Bukittinggi	64 orang	3,120,000	DAU		50 orang	3,182,400
	Program Perlindungan Pengembangan lembaga Ketenagakerjaan	Tingkat kepatuhan perusahaan terhadap undang-undang ketenagakerjaan		80%	47,438,450			85%	48,387,219
1	Penanganan permasalahan dan pemantauan hubungan industrial	Jumlah Kasus PHI yang Ditangani	Kota Bukittinggi	30 kasus	36,345,700	DAU		30 kasus	37,072,614
2	Asistensi dan Pembinaan Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja bersama (PKB)	Laporan Asistensi dan Pembinaan	Kota Bukittinggi	10 Laporan	11,092,750	DAU		10 Laporan	11,314,605
	Program Peningkatan kesempatan Kerja	Tingkat peningkatan penempatan pencari kerja		21%	39,474,500			23%	40,263,990
1	Pelayanan dan Penempatan Tenaga kerja	laporan Informasi Pasar kerja; jumlah pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	Kota Bukittinggi	12 Laporan; 30 orang	39,474,500	DAU		12 Laporan; 30 orang	40,263,990
	Urusan Pilihan								
	Industri								
	Program Pengembangan Industri Kecil Menengah	Jumlah industri kecil menengah yang berkembang		20 unit usaha	534,053,250			25 unit usaha	322,436,535
1	Pelatihan teknis Industri Kecil Menengah	Jumlah peserta pelatihan merajut benang tingkat dasar	Kota Bukittinggi	30 orang	53,658,250	DAU		30 orang	54,731,415
2	Promosi Industri Kecil Menengah	Jumlah IKM yang mengikuti pameran produk unggulan/pameran produk Kompetensi Inti Industri Daerah (KIID)	Luar Kota Bukittinggi	3 event	262,456,000	DAU		4 event/IKM	267,705,120
3	Penyusunan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Industri Kota (RPIK) Bukittinggi	Jumlah Dokumen Perda RPIK Bukittinggi	Kota Bukittinggi	1 Dokumen	168,130,000	DAU		-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (N)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 (N+1)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	Pendampingan Gugus Kendali Mutu	Jml. IKM yang mengikuti Gugus Kendali Mutu	Kota Bukittinggi	5 IKM	49,809,000	DAU		5 IKM	50,805,180
	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Penambahan nilai penjualan IKM		6%	749,965,750			8%	565,580,310
1	Pengelolaan UPTD Kerajinan Industri	Jenis ATK UPTD yang diadakan; jenis jasa yang dilayani; jenis produk promosi yang dibuat; jenis promosi yang diikuti	Kota Bukittinggi	18 jenis; 1 jenis; 3 jenis; 1 promosi	173,850,000	DAU		18 jenis; 1 jenis; 3 jenis; 1 promosi	177,327,000
2	Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri	Jumlah sertifikasi label halal; jumlah IKM yang difasilitasi packing	Kota Bukittinggi	10 lembar; 10 IKM	130,640,500	DAU		10 lembar; 10 IKM	133,253,310
3	Perkuatan Organisasi Mitra Industri	Jenis ATK yang diadakan; Jumlah promosi yang diikuti; Jml makan dan minum; jml. Organisasi yang difasilitasi	Kota Bukittinggi	9 jenis; 3 promosi; 920 bks dan 500 kotak; 1 organisasi	250,000,000	DAU		9 jenis; 3 promosi; 920 bks dan 500 kotak; 1 organisasi	255,000,000
4	Bimbingan Teknis Standarisasi Produk	Jumlah asosiasi pangan yang mengikuti bimtek	Kota Bukittinggi	25 asosiasi	11,911,250	DAU		25 asosiasi	12,149,475
5	Perkuatan Asosiasi Makanan	Jumlah pameran industri pangan yang diikuti	Luar Kota Bukittinggi	1 event	183,564,000	DAU		1 event	187,235,280
					15,370,295,841				6,131,012,514

BAB V

P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sangat diperlukan dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Output Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi adalah Program Tahunan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2020 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja. Rencana Kerja (Renja) juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan dan seluruh staf Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Bukittinggi, Agustus 2019
WALIKOTA BUKITTINGGI


M. RAMLAN NURMATIAS